

ABSTRAK

DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG HASIL USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Oleh

Darlian Pone

Peraturan Daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Namun, sejumlah Perda yang berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama karena belum adanya peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam proses implementasi Perda hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung serta untuk mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi Perda tersebut dalam mencapai tujuan regulatifnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan teoritik (*theoretical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dinamika implementasi Perda di Provinsi Lampung dimulai dari proses pembentukan Perda yang merupakan bagian dari upaya legislatif dalam merespons permasalahan masyarakat. Meskipun telah mengikuti mekanisme legislasi yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi, masih terdapat permasalahan dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menyebabkan Perda inisiatif tidak dapat terlaksana. Permasalahan ini disebabkan oleh faktor anggaran dan prioritas program kerja pemerintah daerah. Selain itu, pemerintahan daerah menekankan pentingnya keseimbangan antara kemandirian daerah dan kemampuan administratif. 2) Perda hasil usul inisiatif DPRD di Provinsi Lampung periode 2019-2024 belum efektif dalam implementasinya. Dari total 41 Perda, 27 Perda masih belum memiliki Pergub sebagai peraturan pelaksanaannya, yang disebabkan oleh faktor struktur hukum yang menghambat penyusunan Pergub tersebut. Oleh karena itu, di tingkat struktur, penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan perda. Substansi perda perlu didesain dengan pendekatan partisipatif dan berbasis bukti, agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Dari sisi budaya hukum, dibutuhkan edukasi publik, pelatihan aparat, dan monitoring berkala untuk mendorong kepatuhan dan akuntabilitas pelaksanaan Perda.

Kata Kunci: Dinamika, Implementasi, Peraturan Daerah, Inisiatif, DPRD

ABSTRACT

DYNAMICS OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS IN LAMPUNG PROVINCE AS A RESULT OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL'S INITIATIVE PROPOSAL

By

Darlian Pone

Regional Regulations (Perda) have a strategic role in the implementation of regional government, including in Lampung Province. However, a number of Perda originating from the initiative proposals of the Regional People's Representative Council (DPRD) face obstacles in their implementation, especially because there are no implementing regulations. This study aims to analyze the dynamics that occur in the implementation process of Perda resulting from the DPRD initiative proposal in Lampung Province and to evaluate the level of effectiveness of the implementation of these Perda in achieving their regulatory objectives. This study uses a normative-empirical legal research method. The approaches applied in this study include the statute approach, case approach, and theoretical approach. The results of the study show that: 1) The dynamics of the implementation of Perda in Lampung Province begins with the process of forming Perda which is part of the legislative effort in responding to community problems. Although it has followed the applicable legislative mechanisms, from the planning stage to implementation, there are still problems in the preparation of the Governor's Regulation (Pergub) which causes the initiative Perda to not be implemented. This problem is caused by budget factors and priority of regional government work programs. In addition, the regional government emphasizes the importance of balance between regional independence and administrative capacity. 2) Regional regulations resulting from DPRD initiatives in Lampung Province for the 2019-2024 period have not been effective in their implementation. Of the total 41 Regional Regulations, 27 Regional Regulations still do not have a Governor's Regulation as their implementing regulations, which is caused by legal structure factors that hinder the preparation of the Governor's Regulation. Therefore, at the structural level, it is important to strengthen the coordination mechanism and resource allocation for the implementation of regional regulations. The substance of regional regulations needs to be designed with a participatory and evidence-based approach, so that it is in accordance with regional needs and conditions. In terms of legal culture, public education, training of officers, and periodic monitoring are needed to encourage compliance and accountability for the implementation of Regional Regulations.

**Keywords: Dynamics, Implementation, Regional Regulations, Initiatives,
Regional People's Representative Council**